



**PERJANJIAN KINERJA
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional/daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aryanto Wibowo
Jabatan : Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sally Salamah
Jabatan : Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Aryanto Wibowo
NIP. 19680111 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TARGET SETAHUN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
				SATUAN	TOTAL
1		2		3	4
1	Meningkatnya dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara	1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Badan Usaha	7,00
		1.2	Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	BUMN	12,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Badan Usaha	9,00
		2.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional (PSN)	4,00
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)	3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Badan Usaha	16,00
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN	4.1	Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik	BUMN	15,00
5	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	5.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Badan Usaha	9,00
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah K/L dengan MRI \geq Level 3	K/L	2,00
		6.2	Jumlah K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L	2,00
		6.3	Jumlah APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L	2,00
		6.4	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	BUMN	24,00
		6.5	Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMN	5,00
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara	7.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	80,00
		7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1,00
		7.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1,00
8	Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputi Akuntan Negara	8.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00
		8.2	Persentase Penyelesaian RTP(MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00

Kegiatan	Anggaran	
1. Pengawasan Pembangunan	Rp	1.530.000.000,00
2. Dukungan Manajemen Internal	Rp	0,00
Jumlah	Rp	<u>1.530.000.000,00</u>

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Sally Salamah

Aryanto Wibowo

NIP. 19670420 198703 2 001

NIP. 19680111 198803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA KONEKTIVITAS, PARIWISATA,
KAWASAN INDUSTRI, DAN PERUMAHAN
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN

NO	KODE	LEVEL	SEKTOR/TEMA/ TOPIK PENGAWASAN	PERAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	A.1.e	TOPIK	Pemajuan Kebudayaan	Kontributor	-	-	✓	-
2	A.3.c	TOPIK	Penguatan Platform Penyaluran s.d. Pemanfaatan Bantuan Sosial	Kontributor	-	-	-	✓
3	A.3.f	TOPIK	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Kontributor	-	-	-	✓
4	B.2.c	TOPIK	Pembangunan Infrastruktur Kereta	Kontributor	-	✓	-	✓
5	B.2.d	TOPIK	Pembangunan Bandara	Kontributor	-	✓	-	✓
6	B.2.e	TOPIK	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	Kontributor	-	✓	-	✓
7	B.3.c	TOPIK	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	Kontributor	✓	-	-	-
8	C.1.a	TOPIK	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran K/L	Kontributor	✓	-	-	-
9	C.1.b	TOPIK	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat	Kontributor	✓	✓	✓	✓
10	C.1.c	TOPIK	Optimalisasi Pendapatan Negara (Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, serta PNBPN)	Kontributor	-	✓	-	-
11	C.4.a	TOPIK	BUMN	Kontributor	-	✓	-	-
12	D.2.a	TOPIK	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	Kontributor	✓	-	-	-
13	D.2.b	TOPIK	Akses Permodalan UMKM	Kontributor	✓	-	-	-
14	D.3.a	TOPIK	P3DN	Kontributor	✓	✓	✓	✓
15	D.3.c	TOPIK	Hilirisasi Industri	Kontributor	-	-	✓	-
16	D.3.f	TOPIK	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri	Kontributor	-	-	✓	-
17	D.4.b	TOPIK	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	Kontributor	✓	-	-	-
18	G.1.d	TOPIK	Maturitas SPIP/MRI - Kementerian/Lembaga	Kontributor	-	-	-	✓
19	G.1.f	TOPIK	Kapabilitas APIP - Kementerian/Lembaga	Kontributor	-	-	-	✓
20	G.1.g	TOPIK	Manajemen Risiko Badan Usaha	Kontributor	-	-	-	✓
21	G.3.a	TOPIK	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	Kontributor	✓	-	-	-

Pihak Kedua

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Aryanto Wibowo
NIP. 19680111 198803 1 001